Hukum Acara Pidana.

Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan Pengadilan Tinggi terhadap permintaannya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 - 12 - 1980 No. 336 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Makale tanggal 23 Desember 1978 No. 24/1978 dalam putusan mana tertuduh :

Marhana Tambaru, umur + 44 tahun, tempat tinggal di jalan Sesean No. 28 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tinggi Toraja, pekerjaan tidak ada;
penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

I. Bahwa ia, tertuduh pada sekitar antara tahun 1900 lima puluh enam, dan tahun 1900 enam puluh enam di Jalan Sesean, Desa Rantepao, Kecamatan Rantepao, atau ditempat lain dalam Kecamatan Rantepao, wilayah Pengadilan Negeri Makale, ia tertuduh telah memasuki dan telah memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah yaitu ia, tertuduh telah mendirikan rumah diatasnya atau telah dikuasainya diatas tanah kepunyaan saksi Johanis Parrangan, sedang ia, tertuduh tidak mempunyai ijin dari Johanis Parrangan tersebut atau kuasanya.

II. Bahwa ia, tertuduh pada tanggal 22 Januari 1900 tujuh puluh delapan atau suatu waktu dalam bulan Januari 1978 tersebut, dijalan Sesean Rantepao, Kecamatan Rantepao wilayah Pengadilan Negeri Makalo, ia tertuduh merusak pagar kintal dari saksi Johanis Parrangan dengan jalan ia tertuduh telah mencabut pagar-pagar yang dibuat oleh Johanis Parrangan sehingga pagar tersebut tidak dapat dipakai lagi.

dengan memperhatikan pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (L.N No. 158 tahun 1960) telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa tertuduh Marhana Tambaru, umur ± 44 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dijalan Sesean No. 28 Rantepao, bersalah atas kejahatan: Menguasai/menduduki tanah tanpa ijin yang berhak (Penyerobotan) dan Pengrusakan pagar sesuai dengan pasal 404 ayat 1 jo pasal 406 ayat 1 dari K.U.H.P.;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara buat lamanya 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali dalam jangka 6 (enam) bulan ia terhukum melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara ini berupa dua potong ruas pagar bambu kepada pemiliknya;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1979 No. 41/1979/PT. Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa pembanding Marhana Tambaru;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Desember 1978 Pidana No. 24/1978/Pid. B/PN. Mkl. sepenuhnya;

Menghukum terdakwa pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. yang

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 12 Desember 1979 dari tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri di Makale pada tanggal 15 Desember 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 September 1980 No. 444/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1950 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 25 Oktober 1979 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 1979 serta risalah kasasi pada tanggal 15 Desember 1979 di kepanitera-an Pengadilan Negeri di Makale dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa menurut penuntut kasasi putusan Hakim Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang begitu singkat tanpa memerinci unsur mana dari tindak pidana yang dituduhkan kepada tertuduh yang dipandang terbukti secara syah dan menurut hukum dan dengan alat bukti mana tiap unsur itu dianggap terbukti.

2. bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum dan jurisprudensi dan karenanya adalah merupakan salah satu alasan membatalkan putusan ini dalam tingkat kasasi, hal ini terbukti dari pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengemukakan bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan keputusan Hakim Pertama, sedangkan yang jelas menurut hukum dan jurisprudensi bahwa hal-hal baru yang dikemukakan dalam tingkat banding atau pada tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi (putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 September 1972 reg. No. 1340 K/Sip/1971 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 September 1968 No. 328/1968/Perd/P1-B).

3. bahwa pendapat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya mengenai permintaan terdakwa pembeding agar Pengadilan Tinggi menunda terlebih dahulu pemeriksaan kasus perkara ini untuk menunggu penyelesaian persoalan perdatanya dengan diajukannya gugatan dari saksi Johannis Parrangan, menurut Pengadilan Tinggi permintaan terdakwa pembeding tersebut adalah tidak beralasan karena jelas tidak mungkin bagi Pengadilan Tinggi untuk menunda pemeriksaan suatu perkara digantungkan pada perkara lain yang belum ada sama sekali. Hal ini bertentangan dengan azas mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

4. bahwa dengan memperhatikan surat tuduhan Jaksa pada tuduhan I dan II maka jelas bahwa surat tuduhan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan dikelhendaki oleh pasal 250 ayat 4 HIR dimana disebutkan bahwa surat tuduhan itu harus memuat uraian yang lengkap tentang hal-ikhwal dan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh tertuduh, bila tidak, menjadi alasan batalnya surat tuduhan itu.

5. bahwa dari surat-surat pembayaran pajak Ipeda sejak tahun 1968 sampai tahun 1978 ternyata bahwa pembayaran pajak atas tanah pekarangan tersebut adalah atas nama tertuduh sebagai pemilik dan laatste bezitter atas tanah itu.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 dan ad 5 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena andaikata hal tersebut betul akan tetapi tidak berkenaan dengan perkara ini.

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan persoalan prayudisial (praejudicieel geschil).

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tuduhan-tuduhan telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 250 ayat (4) H.I.R, lagi pula penuntut kasasi tidak menunjukkan dimana letaknya kekurangan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Marhana Tambaru tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 24 Desember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 1 Agustus 1979 menjatuhkan Keputusannya seperti disebut dibawah ini dalam perkaranya:

Marhana Tambaru, umur 44 tahun, pekerjaan tidak ada, tinggal di jalan Sesean, No. 28 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja;
Tersangka berada diluar tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Makale dalam perkaranya terdakwa tersebut beserta keputusannya tertanggal 23 Desember 1978 Pidana No.: 24/1978/Pid.B/P.N.Mkl dan diumumkan pada tanggal 28 Desember 1978 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa tertuduh: *Marhana Tambaru*, umur 44 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sesean No.: 28 Rantepao, bersalah atas Kejahatan: Menguasai/menduduki tanah tanpa-izin yang berhak (penyerobotan) dan pengrusakan pagar sesuai dengan pasal 404 ayat 1 yo pasal 406 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara buat lamanya 2 (dua) bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali dalam jangka 6 (enam) bulan ia terhukum melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara ini berupa dua potong ruas pagar bambu kepada pemiliknya;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) rupiah;

2. Surat catatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Desember 1978 dimana

dicatat bahwa terdakwa telah memajukan permohonan agar perkaranya tersebut diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, yang juga diberitahukan pada pihak Jaksa;

3. Memori serta tambahan memori banding yang diajukan oleh terdakwa pembeding, dan adanya memori banding ini juga telah disampaikan pada pihak Jaksa dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena banding diajukan dalam tenggang waktu dan cara menurut ketentuan undang-undang karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari serta meneliti perkara terdakwa diatas beserta keseluruhan memori bandingnya, dan setelah penelitian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa pembeding dalam memorinya itu menurut Pengadilan Tinggi telah turut dipertimbangkan oleh Hakim pertama dalam keputusannya meskipun tidak diuraikan secara terperinci mengingat bidang yang dibahas adalah persoalan pidana dan karenanya menurut Pengadilan Tinggi Hakim pertama telah benar dengan pertimbangannya;

Menimbang bahwa memori banding terdakwa pembeding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan keputusan Hakim pertama seperti dikehendaki oleh terdakwa pembeding, dan tentang permohonan terdakwa pembeding agar Pengadilan Tinggi menunda terlebih dahulu pemeriksaan kasus perkara ini dan memerintahkan pula pada pihak saksi Johanis Parrangan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Makale menurut hemat Pengadilan Tinggi permintaan terdakwa pembeding tersebut adalah tidak beralasan karena jelas tidak mungkin bagi Pengadilan Tinggi untuk menunda pemeriksaan sesuatu perkara, digantungkan pada perkara lain yang belum ada sama sekali, begitu pula adalah tidak tepat pada Pengadilan Tinggi memerintahkan pada pihak-pihak tertentu untuk memasukkan gugatan perdata kepada suatu Pengadilan Negeri karena untuk menggugat ataupun tidak adalah hak penuh dari pihak yang berkepentingan dan bukanlah urusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka memori banding terdakwa pembeding oleh Pengadilan Tinggi dikesampingkan dan oleh karena keputusan Hakim pertama telah didasarkan pada alasan serta pertimbangan yang tepat lagi benar alasan pertimbangan

an mana oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menguatkan keputusan Hakim pertama tersebut;

Menimbang bahwa adalah perlu untuk tetap membebankan biaya perkara dalam tingkat banding pada terdakwa pembeding;

Memperhatikan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari terdakwa pembeding Marhana Tambaru;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Desember 1978 Pidana No. 24/1978/Pid.B/PN.MKL sepenuhnya;

Menghukum terdakwa pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 1980 tujuh puluh sembilan oleh kami Achmad Masrul SH, Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Ny. Aminah Halik, Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Makale tgl. 23 - 12 - 1978 No. 24/1978/
Pid. B/PN. MKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI MAKALE yang bersidang secara majelis didalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah mengambil Keputusan sebagai berikut dalam perkara tersangka;

Marhana Tambaru, umur 44 tahun, pekerjaan tidak ada, tinggal di jalan Sesean No. 28 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja;

Tersangka berada diluar tahanan;

Tersangka belum pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat segala surat-surat yang bertalian dengan perkara ini;

Telah membaca surat tuduhan Jaksa pada Perwakilan Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao, No.: 05/Tuduhan/1978 tanggal 26 April 1978;

Telah membaca surat penetapan hari sidang tertanggal 10 Agustus 1978, No.: 65; Pen.Pid/1978/PN.MKL, yang menetapkan hari persidangan dalam perkara tersangka tersebut diatas;

Telah mendengar dipersidangan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah;

Telah mendengar requisitoir dari Jaksa yang menyatakan bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada tersangka pada tuduhan pertama yaitu memasuki/menguasai tanah tanpa izin dari pemiliknya atau kuasanya sesuai dengan isi pasal 6 (12) PP.UU.No. 51/1960, telah terbukti dengan ayah dan meyakinkan dan oleh karena itu menuntut agar tersangka dijatuhi pidana penjara buat lamanya 3 (tiga) bulan dan menghukum pula tersangka membayar ongkos perkara sebesar Rp. 500.- (lima ratus rupiah). Tanda bukti yang dipergunakan dalam perkara ini berupa pagar kayu dikembalikan kepada yang berhak;

Telah mendengar pula pembelaan dari tersangka serta replik dari Jaksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tersangka menurut surat tuduhan Jaksa ter-

tanggal 26 April 1978 No. 05/Tuduhan/1978 dituduh sebagai berikut;

I. Bahwa ia tertuduh pada sekitar tahun 1956 dan tahun 1966 dijalan Sesean, Desa Rantepao, Kecamatan Rantepao, atau ditempat lain dalam kecamatan Rantepao wilayah Pengadilan Negeri Makale ia tertuduh telah memasuki dan telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yaitu ia tertuduh telah mendirikan rumah diatasnya atau telah dikuasainya diatas tanah kepunyaan saksi Johanis Parrangan sedang ia tertuduh tidak mempunyai izin dari Johanis Parrangan tersebut atau kuasanya;

II. Bahwa ia tertuduh pada tanggal 22 Januari 1978 atau suatu waktu dalam bulan Januari 1978 tersebut dijalan Sesean Rantepao, Kecamatan Rantepao wilayah Pengadilan Negeri Makale ia tertuduh telah merusak pagar kintal dari saksi Johanis Parrangan dengan jalan: Ia tertuduh telah mencabut pagar-pagar yang dibuat oleh Johanis Parrangan sebagai pagar tersebut tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa tersangka didalam pembelaannya pada sidang tanggal 13 Juli 1978 yang lengkapnya tertera dalam berita acara persidangan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya mengutarakan bahwa apa yang diuraikan oleh Jaksa didalam surat tuduhannya itu adalah tidak benar;

Bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan orang tua dari tersangka yang dihibahkan kepada saksi Johanis Parrangan dengan syarat bahwa saksi Johanis Parrangan berkewajiban untuk membantu orang tua tersangka juga tersangka yaitu bilamana orang tua tersangka meninggal dunia maka saksi Johanis Parrangan berkewajiban untuk membantai kerbau akan tetapi oleh karena pada waktu orang tua tersangka meninggal dunia, saksi Johanis Parrangan diam saja;

Bahwa oleh karena ternyata kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saksi Johanis Parrangan tidak dilaksanakan maka oleh tersangka dengan surat tertanggal 22 Nopember 1977 menyatakan membatalkan hibah atas tanah tersebut kepada saksi Johanis Parrangan tersebut;

Bahwa demikianlah sebahagian tanah tersebut oleh terdakwa dikuasai kembali berdasarkan hak waris dari Ne' Barung/Lai' Bira' almarhum dan balgi yang pernah diberikan kepada saksi Johanis Parrangan dinyatakan batal karena ternyata saksi Johanis Parrangan maupun orang tuanya Ch. Parrangan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai penerima balgi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan-

keterangan dari 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : 1. Johanis Parrangan; 2. Laha; 3. Ch. Parrangan; 4. Tappa;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi utama Johanis Parrangan pada dasarnya diuraikan sebagai berikut;

Bahwa tanah yang terletak di jalan Sesean Rantepao, telah menjadi hak penuh dari saksi berdasarkan hibah yang diberikan oleh suami-isteri Ne' Barung dan Ne' Bira' dan penghibahan atas tanah tersebut dilakukan dihadapan saksi-saksi dan pemerintah tersebut;

Bahwa penghibahan tersebut terjadi pada tanggal 12 September 1947; Bahwa setelah hibah tersebut dilaksanakan maka saksi bersama dengan orang tua saksi telah menanam tanaman diatas tanah tersebut serta mendirikan rumah diatasnya sesuai dengan surat idzin yang dikeluarkan oleh De.O. opzichter der L. Werken dengan suratnya tertanggal 7 Mei 1948;

Bahwa dalam tahun 1952 saksi berangkat ke Ujung Pandang untuk melanjutkan sekolah dan rumah tersebut dipersewakan kepada lelaki Akiu dimana pemeliharaan dan pengurusannya saksi serahkan kepada orang tua saksi yakni Ch. Parrangan dengan pesan pula bahwa sewah dari rumah tersebut supaya diberikan pula kepada Ne' Barung dan Ne Bira' dan perempuan Lai' Tambaru bila mereka memerlukannya. Bahwa pajak tanah dan tanaman diatas tanah itu tetap dibayar oleh pihak saksi;

Bahwa sekitar dalam tahun 1968 saksi mendapat cuti dan berkesempatan untuk datang di Rantepao dimana saksi sangat heran oleh karena tanaman yang dahulu ditanam saksi telah dicabut dan diganti dengan tanaman lain lagi pula saksi melihat telah terdapat tumpukan runtuhan rumah (kayu) dan hal ini saksi terus tanyakan kepada perempuan Lai' Tambaru tentang hal tersebut dimana ternyata tanah tersebut oleh Lai' Tambaru bermaksud untuk menjualnya kepada perempuan Murni; Bahwa maksud dari Lai' Tambaru tersebut langsung dicegah oleh saksi dengan mengajukan persoalan ini kepada Kepala Desa Rantepao dan setelah melalui pembicaraan dimuka Hadat Desa maka oleh Hadat Desa memutuskan bahwa tanah itu tetap didalam penguasaan saksi berdasarkan bukti-bukti yang ada pada waktu itu;

Bahwa kemudian dalam tahun 1978 tanggal 23 Januari saksi berkesempatan pula datang di Rantepao dimana ternyata Lai' Tambaru tidak mematuhi hasil dari putusan Hadat Desa Rantepao dengan mencabut pagar serta menanam tanaman diatas tanah tersebut;

Bahwa alasan yang diberikan oleh tersangka karena ia saksi tidak

pernah memberikan bantuan kepada Ne' Barung dan Ne' Bira' (suami-isteri) maupun kepada tersangka adalah sama sekali tidak benar oleh karena selama kedua suami-isteri tersebut masih hidup saksi sering memberikan bantuan kepada mereka;

Bahwa tentang ketidak hadiran saksi pada saat Ne' Barung dan Ne' Bira' meninggal dunia adalah disebabkan dengan tugas yang dibebankan Negara kepada saksi selaku T.N.I. Angkatan Laut yang sering menjalankan tugas diluar daerah dengan cara yang berpindah-pindah sehingga kematian dari kedua orang tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi dan menyebabkan saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan penguburan dari kedua almarhum tersebut;

Bahwa saksi merasa tidak pernah melalaikan atau sengaja melalaikan kewajiban sebagai anak hibah dari Ne' Barung/Ne' Bira, sehingga alasan pencabutan hibah tersebut tidak dapat dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Laha, pada dasarnya menerangkan bahwa benar tanah yang terletak dijalan Sesean Rantepao telah dihibahkan oleh Ne' Barung dan Ne' Bira' serta tersangka kepada saksi Johanis Parrangan turut bertanda diatas surat penyerahan (hibah) tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Ch. Parrangan dipersidangan pada dasarnya menerangkan pula bahwa ia saksi tidak pernah menyatakan menyetujui pembatalan hibah yang dilakukan oleh pihak tersangka oleh karena ia saksi tidak langsung bertanggung jawab terhadap tanah itu oleh karena tanah itu adalah kepunyaan dari Johanis Parrangan sendiri sesuai dengan hibah yang ada lagi pula Johanis Parrangan telah dewasa sehingga saksi tidak dapat untuk mencampuri hak dari Johanis Parrangan;

Menimbang, bahwa saksi Tappa pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu diadakan pembicaraan penarikan hibah oleh Marhana Tambaru disatu pihak dengan Ch. Parrangan dilain pihak disana pada waktu itu persetujuan pembatalan hibah tersebut dibantah oleh Ch. Parrangan;

Menimbang, bahwa dari uraian yang diberikan oleh tersangka sendiri maupun setelah mendengar uraian dari saksi serta memperhatikan pula surat penyerahan (hibah) kepada saksi Johanis Parrangan, maka terbukti bahwa tanah yang terletak dijalan Sesean Rantepao semula

hak Ne' Barung / Ne' Bira' (suami isteri) yang telah dihibahkan oleh mereka kepada saksi Johanis Parrangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan yang dikemukakan oleh terdangka yang pada dasarnya menerangkan bahwa terdangka menguasai tanah tersebut oleh karena pada semasih hidupnya kedua orang tua terdangka (Ne' Barung dan Ne' Bira) maka tanah yang telah dihibahkan itu telah ditarik kembali oleh kedua orang tua terdangka dimana setelah Ne' Barung dan Ne' Bira' meninggal dunia mutlak tanah tersebut jatuh warisan kepada terdangka;

Menimbang, bahwa dari pokok pembelaan dari terdangka tersebut maka Majelis dalam hal ini menilai bahwa apakah tindakan dari Ne' Barung dan Ne' Bira yaitu membatalkan secara sepihak hibah atas tanah tersebut dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan isi dari surat penyerahan (hibah) tersebut (lampiran foto copy penyerahan terlampir) maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan tersebut disertai dengan syarat yakni kewajiban dari Johanis Parrangan sebagai penerima hibah patut untuk memberikan bantuan kepada pihak pemberi hibah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Johanis Parrangan sendiri yang menerangkan bahwa ia Johanis Parrangan jauh sebelumnya telah melaksanakan kewajibannya sebagai penerima hibah dengan memberikan bantuan berupa materi kepada kedua orang tua terdangka semasih hidupnya;

Bahwa tentang ketidak hadiran saksi pada saat Ne' Barung dan Ne' Bira' meninggal dunia adalah disebabkan karena kedua musibah tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi karena berada diluar daerah sebagai seorang Angkatan Laut yang melaksanakan tugas dengan cara berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah mendengar pula kesaksian yang diberikan oleh Ch. Parrangan ternyata ia saksi menyangkali tentang disetujuinya surat pembatalan hibah atas tanah tersebut kepada Johanis Parrangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa saksi Johanis Parrangan belum dapat untuk dinyatakan lalai didalam kewajiban sebagai penerima hibah oleh karena terdangka sendiri masih hidup dan kewajiban penerima hibah tidak hanya ditentukan dalam suatu bentuk pengorbanan khusus maka dalam hal ini surat pembatalan yang dilakukan secara sepihak itu tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tersangka terbukti telah menduduki tanah tersebut diluar kehendak pemegang hibah yakni Johanis Parrangan, maka apa yang dituduhkan dalam tuduhan I tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan II terhadap diri tersangka dimana dipersidangan tersangka telah mengakui sendiri telah mencabut/mengeluarkan pagar yang dipasang oleh saksi Johanis Parrangan serta adanya tanda bukti yang ada dalam perkara ini maka Majelis berpendapat pula bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka pada tuduhan ke II telah terbukti pula dengan ayah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka baik pada tuduhan I maupun pada tuduhan II maka kepada tersangka patut untuk dijatuh hukuman;

Menimbang, bahwa berhubung karena kedua perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka telah dinyatakan terbukti, maka didalam menentukan hukuman terhadap diri tersangka akan dipergunakan ketentuan yang diatur didalam pasal 63 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan keputusan dalam perkara ini, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh;

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa tertuduh dalam perkara ini memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan pemeriksaan terhadap diri tertuduh;
Bahwa tertuduh sering menunjukkan sikap yang kurang tertib dipersidangan;

Bahwa tertuduh tidak menunjukkan sikap penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan itu;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa tertuduh belum pernah dihukum;

Meinperhatikan pasal undang-undang serta semua peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa tertuduh: Marhana Tambaru, umur 44 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dijalan Sesean No. 28 Rantepao, bersalah atas kejahatan :

Menguasai/menduduki tanah tanpa izin yang berhak (penyero-
botan) dan Pengrusakan pagar sesuai dengan pasal 404 ayat 1 yo
pasal 406 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara buat lama-
nya (2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan
kecuali dalam jangka 6 (enam) bulan ia terhukum melakukan perbuatan
yang dapat dihukum;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara
ini berupa dua potong ruas pagar bambu kepada pemiliknya;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 250.- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari
Sabtu tanggal 23 Desember 1980 tujuh puluh delapan oleh Soekarjo
A. Gani SH, Ketua, M.B.P. Borotoding dan Dicky Sosang, Hakim-
Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 1980 tujuh puluh delapan
oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh M.B.P. Borotoding
dan Dicky Sosang, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Th.
Parcallo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh J.M. Palesang, Jaksa pada Perwakilan Kejaksaan Negeri
Makale di Rantepao dan tertuduh.